



MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN YANG BERMUTU

Mursalin¹, Saidah², Yani Suryani³

¹⁻³Institut Agama Islam An Nur Lampung

Email: mursalin.mh17@gmail.com

Abstract: Education financing is one of the central systems in education. This study aims to find out about financing to support the implementation of education. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that the use of education financing is oriented towards the head of educational operational financing that supports improving the quality of education that is right on target by fulfilling the school financial management governance system that must be understood in the implementation of education financing, namely the concept of education budgeting, classifying activities, determining standardization, and determining costs unit in education budgeting. Education financing management has three important stages, namely planning, implementation stage and evaluation (evaluation) stage. These three stages when applied to financial management are the financial planning (budgeting) stage, and the implementation (accounting) stage, and the appraisal or auditing stage. With an education financing management system, it is hoped that it will be able to support, guarantee the development of the quality and quality of education and the process of organizing teaching and learning activities.

Keywords: Funding Management, Quality of Education

Abstrak: Pembiayaan pendidikan merupakan salah sistem yang sentral dalam pendidikan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan pada pendukung penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Kata kunci: Manajemen Pembiayaan, Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang



tecantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan Sumber Daya Manusia. Tak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu mengamati proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara formal maupun informal. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat menjadi lebih bermoral dan mengetahui yang tidak pernah diketahui sebelumnya. (Murtafiah, 2021) Pendidikan sebenarnya adalah hak semua manusia, tidak peduli dia miskin atau kaya, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua manusia yang diikuti dengan kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik oleh pemerintah, pengelola madrasah dan oleh masyarakat agar mutu pendidikan di Indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Acuan ini dijadikan standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. (Harun, 2019)

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. (Fathoni, 2019). Pembiayaan menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran penting atas berjalannya proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan memadai akan berakibat pada berlangsungnya pembelajaran yang maksimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Tarmizi dalam jurnalnya yang berjudul "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie", yang menyebutkan bahwa pengawasan yang rendah terhadap penggunaan pendidikan akan mengakibatkan sumber-sumber biaya pendidikan yang diperoleh belum memberikan dampak yang optimal. Karena pemanfaatan



biaya yang kurang tepat dengan tidak memberikan prioritas bagi faktor- faktor yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi.

Sebaliknya, tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. "Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain". Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan, terutama di madrasah/sekolah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah/sekolah diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. "pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah". Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen pendidikan.(As'ad, 2019)

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan pendidikan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain.(Haekal et al., 2022) Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, maupun disadari atau tidak.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh data mengenai dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Peneliti juga melakukan observasi langsung untuk mendapatkan informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Observasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan ini diperlukan karena menjadi salah satu komponen yang dibiayai.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau biaya. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya.

Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan.

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing.

Penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang amat penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jamaluddin menyatakan "anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari uang dalam bentuk angka-angka dari uang untuk jangka waktu tertentu". Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Fungsi anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.

Harjanto menyebutkan bahwa perencanaan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah, sekolah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang dalam perencanaan pembiayaan sekolah sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa bahwa perencanaan pembiayaan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni



penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
2. Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.
3. Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

Menurut Nanang Fattah Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran.
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial.
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f) Melakukan revisi usulan anggaran.
- g) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- h) Pengesahan anggaran.



Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan- kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

2. Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah

Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM.

3. Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.

Evaluasi merupakan tahap terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh



Nanang Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat criteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk:

- a. Memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.
- c. Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpanan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.

Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah. Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.

Fungsi evaluasi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar.

Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen



pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, F. & F. (2019). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman MENGELOLA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : Studi Etnografi d i SMA Sultan Iskandar Muda Kota Medan*. 59-72.
- Fathoni, Z. (2019). *Manajemen Penbiayaan Lembaga PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS ZISWAF (Studi pada Pesantren Tahfizh Alam Qur ' an Ponorogo) TESIS Oleh : November*, 1-114. www.iainponorogo.ac.id
- Haekal, T. M., KS, M. M., Yusuf, M. I., Wahyudi, M. A., Fajri, Y., & ... (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V3RdEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA123&dq=modernisasi+sitem+administrasi+perpajakan&ots=4iLL90WcO9&sig=bf8gjzSmuKbsFh5v8S0ZSOmqvI>
- Harun, M. H. (2019). Pendidikan Islam: Analisis dari Perspektif Sejarah. *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 7(2), 66. <https://doi.org/10.33506/jq.v7i2.370>
- Murtafiah, N. H. (2021). *Analisis Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Profesional (Studi Kasus : IAI An-Nur Lampung)*. 789-812. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2358>